



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : [@NomorND]

Tanggal : [@TanggalND]



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 35 :
PROSEDUR ANALITIS LAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
TIM PENYUSUN	3
A. PENDAHULUAN	4
1. Dasar Hukum.....	4
2. Latar Belakang	4
3. Tujuan	5
4. Ruang Lingkup	5
B. PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR ANALITIS LAPORAN KEUANGAN	6
1. Overview Prosedur Analitis Laporan Keuangan.....	6
2. Pelaksanaan Prosedur Analitis pada Laporan Keuangan	8
a. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LRA dengan LO.....	8
b. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LO dengan Neraca	11
c. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LO dengan LPE.....	15
d. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LPE dengan Neraca	16
3. Operasionalisasi Menu Prosedur Analitis pada Aplikasi MyIntress	17
LAMPIRAN I – TRANSAKSI AKRUAL.....	26
LAMPIRAN II – AKUN NON REFERENSI	28

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 35
PROSEDUR ANALITIS LAPORAN KEUANGAN PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pengarah :

1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Chalimah Pujiastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting :

1. Ketua Tim: Hazmi Muzakki (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
2. Anggota Tim:
 - a. Anas Isnaeni
 - b. Andreas Oktorinus
 - c. Christine Desyntha Sinaga

Kontributor :

1. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan beserta jajaran

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 35**PROSEDUR ANALITIS LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA****A. PENDAHULUAN****1. Dasar Hukum**

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- e. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 117);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

2. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) berwenang untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya. Proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tersebut diselenggarakan menggunakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi untuk menghasilkan LKKL yang berkualitas, Pemerintah telah mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah diterapkan di seluruh Kementerian Negara/Lembaga sejak tahun 2022. Penerapan SAKTI membawa perubahan mendasar pada proses bisnis akuntansi K/L melalui proses pembentukan jurnal

otomatis pada saat perekaman transaksi mulai di level Satuan Kerja (Satker). Mekanisme pembentukan jurnal otomatis pada SAKTI telah mengikuti kaidah akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang memungkinkan adanya perbedaan pengakuan Pendapatan dan Belanja/Beban antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) serta adanya pengakuan Aset/Kewajiban pada Neraca. Kompleksitas proses bisnis akuntansi berbasis akrual tersebut serta perkembangan variasi transaksi dan regulasi pengelolaan keuangan yang dinamis, memicu kebutuhan akan suatu instrumen evaluasi untuk menguji keandalan laporan keuangan yang dihasilkan SAKTI.

Kebutuhan akan adanya instrumen evaluasi tersebut juga diperkuat dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penyempurnaan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI (yang saat ini perannya digantikan oleh MyIntress), agar mampu menghasilkan fitur prosedur analitis laporan keuangan yang terotomatisasi. Prosedur analitis ini sangat penting untuk menguji keterkaitan antar akun, antar pos, dan antar komponen laporan sehingga menjaga validitas angka yang disajikan dalam laporan keuangan dari level Satker sampai ke level konsolidasian pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan instrumen evaluasi kualitas LKKL yang dihasilkan SAKTI serta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengembangan fitur prosedur analitis Laporan Keuangan pada aplikasi MyIntress. Untuk memastikan agar setiap *user* aplikasi MyIntress di setiap jenjang entitas K/L dapat mengimplementasikan fitur tersebut dengan baik, maka diperlukan sebuah pedoman yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) tentang Prosedur Analitis Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Tujuan

Penyusunan PTA Prosedur Analitis Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman dalam memahami keterkaitan antar akun, antar pos, dan antar komponen dari laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada aplikasi SAKTI sehingga mampu melakukan identifikasi ketika terjadi anomali data,
- b. Menjadi pedoman bagi seluruh unit akuntansi dan pelaporan pada K/L dalam menggunakan fitur prosedur analitis di aplikasi MyIntress sebagai alat bantu pengujian beberapa elemen pada kertas kerja telaah laporan keuangan dan alat bantu pengisian kertas kerja konfirmasi pemeriksaan auditor BPK.
- c. Menjadi salah satu pedoman pelaksanaan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) yang berhubungan dengan pengendalian integritas data pada aplikasi SAKTI dan MyIntress.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam PTA ini adalah prosedur analitis terhadap LKKL menggunakan fitur yang disediakan pada aplikasi MyIntress. Prosedur analitis berbeda dengan telaah laporan keuangan. Tidak seperti telaah laporan keuangan yang berbentuk

kertas kerja sebagaimana dilampirkan dalam LKKL, *output* dari prosedur analitis hanya berupa tabel pembantu dalam memahami keterkaitan antar akun, antar pos, dan antar komponen. Sebagian *output* dari prosedur analitis dapat digunakan sebagai acuan dalam mengisi kertas kerja telaah laporan keuangan. Prosedur analitis juga berbeda dengan analisis laporan keuangan. Prosedur analitis merupakan salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan PIPK, sementara analisis laporan keuangan merupakan bentuk pemanfaatan data-data yang sudah tersaji di laporan keuangan.

Pengujian keterkaitan antar akun, antar pos, dan antar komponen yang menjadi ruang lingkup prosedur analitis yang diatur dalam PTA ini adalah sebagai berikut:

a. LRA dengan LO

Pengujian keterkaitan saldo antara LRA dan LO meliputi pengujian saldo Pendapatan dan Belanja/Beban antara LRA dan LO. Pengujian saldo Pendapatan dilakukan dengan menguji Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - LRA yang seharusnya bernilai sama dengan PNBP - LO ditambah/dikurangi dengan transaksi akrual. Sementara pengujian Belanja/Beban dilakukan dengan menguji Belanja - LRA yang seharusnya bernilai sama dengan Beban - LO ditambah/dikurangi dengan transaksi akrual.

b. LO dengan Neraca

Pengujian keterkaitan saldo antara LO dengan Neraca meliputi pengujian saldo Beban Penyusutan dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan serta saldo Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibandingkan dengan Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

c. LO dengan LPE

Pengujian keterkaitan saldo antara LO dengan LPE meliputi pengujian saldo Surplus/Defisit pada LO dibandingkan dengan saldo Surplus/Defisit pada LPE.

d. LPE dengan Neraca

Pengujian keterkaitan saldo antara LPE dengan Neraca meliputi pengujian saldo Ekuitas Akhir pada LPE dibandingkan dengan saldo Ekuitas Akhir pada Neraca.

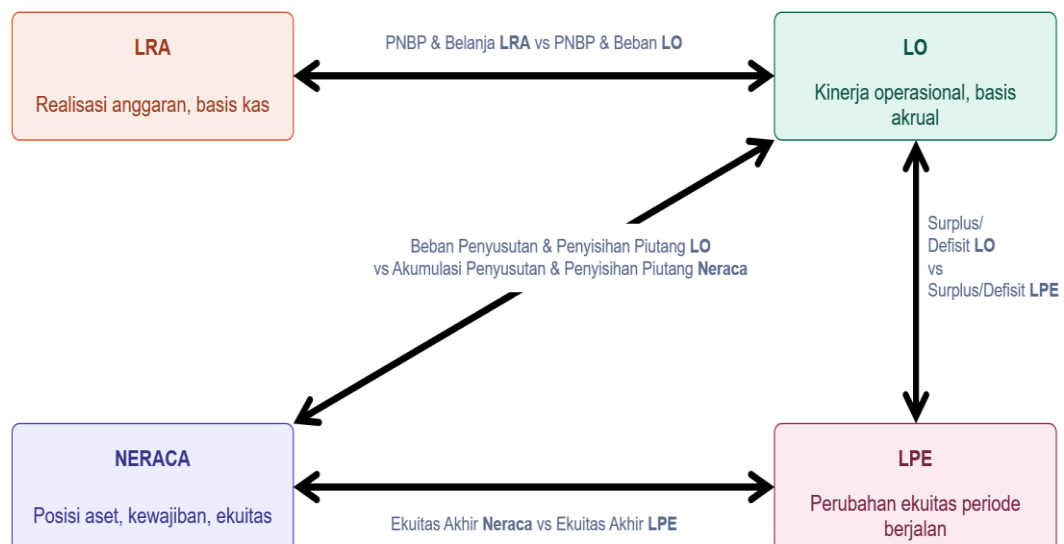
B. PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR ANALITIS LAPORAN KEUANGAN

1. Overview Prosedur Analitis Laporan Keuangan

Prosedur analitis laporan keuangan merupakan metode pengujian yang menerapkan logika keterkaitan antar laporan keuangan serta kesinambungan antar komponen di dalamnya. Landasan dari metode ini adalah bahwa akuntansi pemerintahan menerapkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) yang secara inheren menciptakan keterkaitan logis antar seluruh pos laporan keuangan. Setiap komponen laporan keuangan tidak berdiri sendiri melainkan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan juga semakin menguatkan adanya kebutuhan terhadap prosedur analitis ini, karena adanya jurnal penyesuaian yang menjembatani LRA yang berbasis kas dengan LO yang berbasis akrual. Penerapan basis akrual berimplikasi pada adanya konversi Pendapatan-LRA menjadi Pendapatan-LO dan Belanja-LRA menjadi Beban-LO. Jurnal penyesuaian dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual tersebut menjadi objek pengujian untuk menilai

kewajaran selisih antara kedua jenis laporan yang berbeda basis tersebut.

Tingginya volume transaksi keuangan pemerintah yang disertai kompleksitas pencatatannya memunculkan potensi risiko kesalahan seperti kesalahan entri, ketidakkonsistenan kebijakan akuntansi, dan kegagalan sistem pencatatan transaksi. Kondisi ini menuntut tersedianya alat bantu yang mampu mendeteksi anomali dan ketidakwajaran secara sistematis, sehingga baik pihak penyusun laporan maupun pihak auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas keandalan dan akurasi laporan keuangan yang disajikan. Prosedur analitis laporan keuangan dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyajikan posisi saldo suatu komponen laporan keuangan dan membandingkannya secara otomatis dengan komponen laporan keuangan lainnya yang memiliki keterkaitan logis. Adanya prosedur analitis laporan keuangan ini memastikan bahwa keterkaitan antar akun, antar pos, dan antar komponen dalam laporan keuangan telah memenuhi kaidah SAP. Diagram di bawah ini menggambarkan prosedur analitis yang menjadi fokus dalam PTA ini.



Dalam konteks pengelolaan keuangan K/L, prosedur analitis ini diimplementasikan melalui fitur pada aplikasi MyIntress yang dirancang khusus untuk melakukan pengujian keterkaitan antar komponen laporan keuangan secara otomatis. Melalui fitur ini, Satker dapat secara efisien menguji kewajaran transaksi, mengidentifikasi anomali, serta mendeteksi potensi kesalahan pencatatan berdasarkan data keuangan yang tersaji dalam LKKL. Fitur prosedur analitis pada aplikasi MyIntress dapat diakses melalui menu Akuntansi dan Pelaporan – Prosedur Analitis.

Penting untuk dipahami bahwa fitur prosedur analitis laporan keuangan pada MyIntress ini merupakan salah satu alat bantu dalam pelaksanaan telaah laporan keuangan yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Fitur ini dirancang untuk membantu pelaksanaan telaah laporan keuangan seperti menguji kewajaran hubungan antara pos Surplus/(Defisit) – LO antara yang tersaji di LO dengan yang tersaji di LPE atau menguji kewajaran hubungan antara pos Ekuitas Akhir di LPE dengan pos Ekuitas di Neraca. Oleh karena itu, kewajiban pelaksanaan telaah laporan keuangan sesuai PMK 232/PMK.05/2022 tetap berlaku sepenuhnya, sementara fitur prosedur analitis berfungsi

sebagai fitur pendukung. Selain itu fitur prosedur analitis ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengisi kertas kerja konfirmasi pemeriksaan auditor BPK.

2. Pelaksanaan Prosedur Analitis pada Laporan Keuangan

a. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LRA dengan LO

Pengujian keterkaitan antara LRA dengan LO merupakan uji horizontal untuk menguji dan/atau menguraikan kesesuaian hubungan antar akun yang ada dalam komponen data keuangan LRA dan LO.

Pendapatan LRA = Pendapatan LO +/- Transaksi Akrua

Belanja = Beban +/- Transaksi Akrua

Ilustrasi yang menjelaskan beberapa jenis transaksi akrual dan dampaknya terhadap perbedaan nilai pos antara LRA dengan LO diuraikan lebih lanjut pada Lampiran I – Transaksi Akrua.

Skema dan pola pengujian yang dibangun pada prosedur analitis keterkaitan antara LRA dengan LO adalah sebagai berikut:

1) Uji Nilai PNB

Pengujian atas nilai PNB LRA dibandingkan dengan nilai PNB LO ditambah atau dikurangi Transaksi Akrua. Komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diuji meliputi:

Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Transaksi Akrua
A. PNB LRA i. Pendapatan Sumber Daya Alam ii. Pendapatan Badan Layanan Umum iii. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	A. Kegiatan Operasional – PNB LO i. Pendapatan Sumber Daya Alam ii. Pendapatan Badan Layanan Umum iii. PNB Lainnya B. Kegiatan Non Operasional i. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar ii. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	A. Transaksi Akrua (Akun 49XXXX) i. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi ii. Pendapatan Sitaan/Rampasan (Persediaan/Aset) iii. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya iv. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan v. Jurnal Manual/Penyesuaian Khusus vi. Lainnya B. Transaksi Akrua (Akun 421XXX, 424XXX, 425XXX) i. Pencatatan Piutang yang berbeda periode dengan pelunasan Piutang ii. Penerimaan PNB

Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Transaksi Akrua
		dengan SBS yang belum disetor ke RKUN iii. Pendapatan/Pengembalian Belanja TAYL melalui Potongan SPM iv. Pengembalian Kelebihan Pendapatan yang belum terbit SP2D v. Hibah Masuk BLU (BMN) vi. Penerimaan Kas BLU yang belum terbit SP2B BLU vii. Penihilan RPATA TAYL viii. Jurnal Manual/Penyesuaian Khusus (Akun 42XXXX) ix. Lainnya

2) Uji Nilai Belanja/Beban Pegawai

Pengujian atas nilai Belanja Pegawai LRA dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai LO ditambah/dikurangi Transaksi Akrua. Komponen Belanja/Beban Pegawai yang diuji meliputi:

Belanja	Beban	Transaksi Akrua
A. Belanja Pegawai LRA i. Belanja Pegawai ii. Belanja Pegawai BLU	A. Beban Pegawai LO i. Beban Pegawai ii. Beban Pegawai BLU	A. Transaksi Akrua i. BAST Ekstrakomptabel/Jasa dan/atau SPBy/SPP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL ii. BAST Ekstrakomptabel/Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel iii. Pengembalian Belanja yang Berasal dari Potongan SPM yang belum terbit SP2D iv. Selisih Kurs dari BAST/SPP ke SP2D v. Jurnal Manual/Penyesuaian Khusus vi. Lainnya

- 3) Uji Nilai Belanja/Beban Barang dan Jasa Selain Perjalanan Dinas
Pengujian atas nilai Belanja Barang dan Jasa LRA dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa LO ditambah/dikurangi Transaksi Akrua. Komponen Belanja/Beban Barang dan Jasa yang diuji meliputi:

Belanja	Beban	Transaksi Akrua
A. Belanja Barang dan Jasa LRA i. Belanja Barang Dikurangi - Belanja Barang yang menghasilkan persediaan, dan - Beban Kegiatan Non Operasional ii. Belanja Jasa iii. Belanja Barang dan Jasa BLU	A. Beban Barang dan Jasa LO	A. Transaksi Akrua (Akun 59XXXX) i. BAST Ekstrakomptabel/ Jasa menggunakan akun 53 dan/atau SPBy/SPP akun 53 non BAST ii. Jurnal GLP dan/atau Jurnal Penyesuaian Khusus iii. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Ekstrakomptabel) iv. Lainnya B. Transaksi Akrua (Akun 521XXX, 522XXX, 525XXX) i. BAST Ekstrakomptabel/ Jasa dan/atau SPBy/SPP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL ii. BAST Ekstrakomptabel/ Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel iii. Pengembalian Belanja yang Berasal dari Potongan SPM yang belum terbit SP2D iv. Pengisian RPATA/Escrow lainnya berbeda tahun dengan Realisasi RPATA/Escrow Lainnya dan/atau Penihilan RPATA/Escrow Lainnya

Belanja	Beban	Transaksi Akrua
		v. Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 52XXXX) vi. Lainnya

4) Uji Nilai Belanja/Beban Perjalanan Dinas

Pengujian atas nilai Belanja Perjalanan Dinas LRA dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas LO ditambah/dikurangi Transaksi Akrua. Komponen Belanja/Beban Perjalanan Dinas yang diuji meliputi:

Belanja	Beban	Transaksi Akrua
A. Belanja Perjalanan Dinas LRA i. Belanja Perjalanan Dinas ii. Belanja Perjalanan Dinas Satker BLU	A. Beban Perjalanan Dinas LO	A. Transaksi Akrua i. BAST Ekstrakomptabel/Jasa dan/atau SPBy/SPP non BAST Belanja Perjalanan Dinas yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL Belanja Perjalanan Dinas ii. BAST Ekstrakomptabel/Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel iii. Pengembalian Belanja yang berasal dari potongan SPM yang belum terbit SP2D iv. Pengembalian Belanja atas sisa Bank Garansi yang berasal dari setoran v. Selisih Kurs dari BAST/SPP ke SP2D vi. Jurnal GLP dan/atau Jurnal Penyesuaian Khusus vii. Lainnya

b. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LO dengan Neraca

Pengujian keterkaitan antara LO dengan Neraca merupakan uji horizontal untuk menguji dan/atau menguraikan kesesuaian hubungan antar akun yang ada dalam komponen data keuangan LO dan Neraca. Skema pengujian yang dibangun pada prosedur analitis keterkaitan antara LO dengan Neraca adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan Beban Penyusutan/Amortisasi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

$$\text{Beban Penyusutan (LO)} = \text{Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun (NRC)} - \text{Akumulasi Penyusutan Awal Tahun (NRC)} \pm \text{transaksi penyesuaian}$$

Berdasarkan PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan/amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan/amortisasi dalam laporan operasional.

Berdasarkan definisi tersebut, maka keterkaitan antara beban penyusutan/amortisasi dan akumulasi penyusutan/amortisasi adalah sebagai berikut:

	Beban Penyusutan/Amortisasi	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
Sifat	a. Beban secara periodik (semesteran) b. Setiap beban penyusutan/amortisasi yang dicatat menambah saldo akumulasi penyusutan/amortisasi	a. Akumulasi historis b. Merupakan jumlah total dari semua beban penyusutan/amortisasi yang telah dicatat
Dampak terhadap LK	Beban Penyusutan/Amortisasi pada Laporan Operasional	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Neraca (Mengurangi nilai Perolehan Aset Tetap)

Namun demikian, penyajian akumulasi penyusutan/amortisasi yang menjadi pengurang nilai perolehan aset tetap tidak selalu berupa penyusutan/amortisasi yang dilakukan secara periodik namun dapat berupa penyusutan secara transaksional (tidak berpasangan dengan beban penyusutan). Penyusutan secara transaksional pada prinsipnya merupakan penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat adanya transaksi suatu aset tetap/aset lainnya. Jenis transaksi yang dapat berdampak pada timbulnya penyusutan transaksional antara lain saldo awal, koreksi nilai, reklasifikasi, transfer, penghapusan, dan lain-lain. Transaksi ini menjadi perhitungan sebagai **transaksi penyesuaian** dalam perbandingan beban penyusutan/amortisasi dan akumulasi penyusutan/amortisasi.

Berikut adalah transaksi akumulasi penyusutan yang bertambah/berkurang tanpa ada beban penyusutan di periode tersebut:

a) Transaksi penyusutan yang berpengaruh ke Koreksi Aset Tetap non Revaluasi

i. Saldo Awal

Pencatatan saldo awal atas perolehan Aset Tetap selain yang bersumber dari hibah dan rampasan, yang diperoleh sejak periode

- pelaporan sebelumnya (TAYL), maka pencatatan atas aset tersebut akan otomatis membentuk nilai akumulasi penyusutan yang berpasangan dengan Koreksi Aset Tetap non Revaluasi.
- ii. Hibah Masuk/Rampasan (TAYL)
Pencatatan saldo awal atas perolehan Aset Tetap yang bersumber dari hibah dan rampasan, yang diperoleh sejak periode pelaporan sebelumnya (TAYL), maka pencatatan atas aset tersebut akan otomatis membentuk nilai akumulasi penyusutan yang berpasangan dengan Koreksi Aset Tetap non Revaluasi.
 - iii. Koreksi Nilai (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah/Berkurang, Koreksi Nilai, dan Koreksi Susulan)
Pencatatan koreksi nilai atas penambahan/pengurangan nilai Aset, yang diperoleh sejak periode pelaporan sebelumnya (TAYL), maka penambahan/pengurangan nilai aset tersebut akan otomatis membentuk nilai akumulasi penyusutan yang berpasangan dengan Koreksi Aset Tetap non Revaluasi.
 - iv. Penghapusan Aset Tetap (Koreksi Pencatatan/Usulan Penghapusan/Penghapusan)
Penghapusan atas Aset Tetap yang diperoleh sejak periode pelaporan sebelumnya (TAYL), maka penghapusan aset tersebut akan otomatis mengurangi nilai aset dan nilai akumulasi penyusutan yang berpasangan dengan Koreksi Aset Tetap non Revaluasi.
- b) Transfer Keluar/Transfer Masuk
Terhadap Aset Tetap yang dilakukan transfer keluar/transfer masuk pada entitas Satker Pemerintah Pusat, maka selain nilai perolehan Aset Tetap yang ditransfer juga dilakukan transfer atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap. Nilai Akumulasi Penyusutan tersebut akan berpasangan dengan akun 313211 (Transfer Keluar) dan/atau Transfer Masuk (313221).
- c) Penghapusan Aset
Terhadap Aset Tetap yang dilakukan penghapusan namun masih memiliki nilai buku, maka penghapusan aset tersebut akan berpasangan dengan beban kerugian pelepasan aset.
- d) Reklasifikasi Keluar/Reklasifikasi Masuk
Terhadap Aset Tetap yang dilakukan reklasifikasi keluar/reklasifikasi masuk, maka selain nilai perolehan Aset Tetap yang direklas juga dilakukan reklasifikasi atas nilai akumulasi penyusutan. Nilai akumulasi penyusutan tersebut akan berpasangan dengan beban penyusutan (atas penyusutan tahun berjalan), dan juga akan berpasangan dengan akun 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (atas penyusutan yang timbul pada TAYL).

Berdasarkan penjelasan keselarasan yang tercipta antara beban penyusutan/amortisasi dan akumulasi penyusutan/amortisasi, maka komponen yang diuji adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan/ Amortisasi LO	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Neraca	Transaksi Penyesuaian
A. Beban Penyusutan/ Amortisasi LO	A. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi LO	A. Transaksi penyusutan yang berpengaruh ke Koreksi Aset Tetap non Revaluasi
i. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	i. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	i. Saldo Awal
ii. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	ii. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	ii. Hibah Masuk/ Rampasan (TAYL)
iii. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	iii. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	iii. Koreksi Nilai
iv. Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	iv. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	iv. Penghapusan Aset Tetap
v. Beban Penyusutan Properti Investasi	v. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	B. Transfer Keluar/Masuk
vi. Beban Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	vi. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C. Penghentian/ Pelepasan Aset D. Reklasifikasi Keluar/Masuk

2) Perbandingan Beban Penyisihan Piutang dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

$$\text{Beban Penyisihan Piutang (LO)} = \text{Akumulasi Penyisihan Piutang Akhir Tahun (NRC)} - \text{Akumulasi Penyisihan Piutang Awal Tahun (NRC)} \text{ +/- Transaksi}$$

Berdasarkan PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Berdasarkan definisi tersebut, maka keterkaitan antara beban penyisihan dan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

	Beban Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyisihan Piutang
Sifat	a. Beban secara periodik (semesteran) b. Setiap beban penyisihan yang dicatat menambah saldo penyisihan piutang	a. Akumulasi historis b. Merupakan jumlah total dari semua beban penyisihan yang telah dicatat
Dampak terhadap LK	Beban Penyisihan Piutang pada Laporan Operasional	Mengurangi nilai Piutang Bruto pada Neraca.

Namun demikian, penyajian penyisihan piutang tidak tertagih yang menjadi pengurang nilai piutang bruto tidak selalu berupa penyisihan piutang yang dilakukan secara periodik namun dapat berupa penyisihan piutang secara transaksional (tidak berpasangan dengan beban penyisihan piutang). Penyisihan piutang secara transaksional pada prinsipnya merupakan penyesuaian nilai akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih akibat adanya transaksi piutang. Jenis transaksi yang dapat berdampak pada timbulnya penyusutan transaksional antara lain saldo awal, koreksi nilai, transfer, penghapusan, pelunasan, dan lain sebagainya. Transaksi ini menjadi **transaksi penyesuaian** pada perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Berikut adalah transaksi penyisihan piutang tidak tertagih tanpa ada beban penyisihan piutang di periode tersebut:

1) Saldo Awal

Pencatatan saldo awal atas piutang yang diperoleh sejak periode pelaporan sebelumnya (TAYL), maka pencatatan atas piutang tersebut akan otomatis membentuk nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang berpasangan dengan Koreksi Lainnya.

2) Koreksi Nilai (TAYL)

Penyesuaian atas saldo piutang (tambah/kurang), yang diperoleh sejak periode pelaporan sebelumnya (TAYL), maka pencatatan atas koreksi nilai tersebut akan membentuk nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang berpasangan dengan koreksi lainnya.

3) Penghapusan/Pelunasan

Seluruhnya menghapus akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih

4) Jurnal manual/jurnal penyesuaian

Melibatkan akun penyisihan piutang tidak tertagih dengan akun selain beban penyisihan piutang tidak tertagih (umumnya dengan akun koreksi lainnya).

c. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LO dengan LPE

Pengujian keterkaitan antara LO dengan LPE merupakan uji horizontal untuk menguji dan/atau menguraikan kesesuaian hubungan antar akun yang ada dalam komponen data keuangan LPE dan LO. Skema pengujian yang dibangun pada prosedur analitis keterkaitan antara LPE dengan LO adalah perbandingan Surplus/Defisit LPE dengan Surplus/Defisit LO.

Surplus/Defisit-LO pada LO = Surplus/Defisit-LO pada LPE

Konsistensi dan keandalan data juga dibutuhkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bagian dari komponen laporan keuangan yang diatur dalam SAP. LO dan LPE bukan merupakan laporan yang berdiri sendiri, melainkan laporan yang terkait erat karena menggambarkan kinerja entitas dengan dinamika kekayaan bersih pemerintah. Keterkaitan antara Surplus atau Defisit LO dengan LPE merupakan cermin dari prinsip artikulasi laporan keuangan, di mana setiap perubahan dalam posisi keuangan yang berasal dari aktivitas operasional harus tercermin secara identik pada perubahan ekuitas.

Prosedur analitis keterkaitan antara LPE dengan LO dilakukan untuk menguji kesesuaian nilai Surplus/Defisit yang terdapat pada kedua laporan tersebut. Apabila nilai surplus/defisit yang disajikan pada kedua laporan tersebut sudah sama maka nilai surplus defisit antar kedua laporan sudah sesuai dan berkesinambungan. Namun apabila nilainya masih beda maka ada proses akuntansi yang belum dilaksanakan, sehingga menjadikan nilai surplus/defisit belum menunjukkan nilai yang sesungguhnya.

Perbedaan nilai surplus/defisit antara kedua laporan tersebut disebabkan oleh adanya Akun Non Referensi. Beberapa Akun Non Referensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit;
- Akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debit;
- Akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi kredit;
- Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan uraian NULL di sisi kredit;
- Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan uraian NULL di sisi debit;
- Akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debit;
- Akun yang secara referensi belum tersedia pada SAKTI.

Penjelasan mengenai permasalahan, indikasi penyebab, dan tindak lanjut atas masing-masing klasifikasi Akun Non Referensi tersebut diuraikan pada Lampiran II – Akun Non Referensi.

d. Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LPE dengan Neraca

Pengujian keterkaitan antara LPE dengan Neraca merupakan uji horizontal untuk menguji dan/atau menguraikan kesesuaian hubungan antar akun yang ada dalam komponen data keuangan LPE dan Neraca. Skema pengujian yang dibangun pada prosedur analitis keterkaitan antara LPE dengan Neraca adalah perbandingan Pos Ekuitas Akhir pada LPE dengan Pos Ekuitas pada Neraca.

Ekuitas Akhir di LPE = Ekuitas di Neraca

Dalam kerangka kerja PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, ekuitas didefinisikan secara fundamental sebagai kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Untuk memastikan transparansi atas pergerakan kekayaan tersebut, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun sebagai penghubung yang menjelaskan secara rinci bagaimana ekuitas awal tahun bertransformasi menjadi ekuitas akhir tahun.

Alur penelaahan dimulai dengan memastikan bahwa saldo ekuitas akhir di LPE telah mengintegrasikan hasil dari Laporan Operasional (LO), yaitu Surplus atau Defisit-LO, serta mengakomodasi pos-pos koreksi lainnya. Angka kumulatif pada baris Ekuitas Akhir LPE, yang dihasilkan dari perhitungan matematis dari Ekuitas Awal ditambah/dikurangi perubahan ekuitas, harus sama dengan pos Ekuitas di sisi Neraca. Adanya ketidaksesuaian angka antara kedua laporan ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat transaksi yang tersaji di Neraca namun tidak terdokumentasi dalam formula matematis di LPE, yang secara teknis akan memutus rantai informasi dan menyebabkan laporan keuangan kehilangan daya telusur atau *audit trail*-nya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh adanya Akun Non Referensi sebagaimana dijelaskan pada bagian Prosedur Analitis Keterkaitan Antara LO dengan LPE.

Penjelasan mengenai permasalahan, indikasi penyebab, dan tindak lanjut atas masing-masing klasifikasi Akun Non Referensi tersebut diuraikan pada Lampiran II – Akun Non Referensi.

3. Operasionalisasi Menu Prosedur Analitis pada Aplikasi MyIntress

Menu Prosedur Analitis terdapat pada menu Akuntansi dan Pelaporan – Prosedur Analitis pada Aplikasi MyIntress.

Aset Tetap	Piutang	Rekonsiliasi	1 Akuntansi dan Pelaporan
Daftar Buku Besar	Monitoring Likuidasi Keluar dan Likuidasi...		Monitoring kepatuhan satker
Daftar Jurnal Umum dan Penyesuaian...	Monitoring Rekap Likuidasi Keluar dan...		2 Prosedur Analitis
Daftar Rincian Saldo Akun	Monitoring Saldo Audited		Rincian Neraca Tidak Balance
Laporan Keuangan	Monitoring Transaksi Resiprokal		Rincian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan BLU	Monitoring Transfer Kas BLU		Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya...
Monitoring Detail Koreksi SPM	Monitoring Transfer Keluar/Masuk		Rincian Saldo Neraca
Monitoring Jurnal Audited - download	Monitoring Tutup Periode		

Setelah *user* melakukan *klik* memilih menu Prosedur Analitis maka akan muncul tampilan form sebagai berikut:

Filter

Silakan mengisi filter

Level Laporan WAJIB

Pilih Level Laporan

BA

-- Pilih BA --

Uji Laporan WAJIB

-- Pilih Jenis Uji Lapor...

Telaah

-- Pilih Kelompok Tela...

Layer

-- Pilih Kelompok Tela...

Periode Sampai Dengan WAJIB

-- Pilih Periode --

X
HAPUS ISIAN

✓
KIRIM

Setelah muncul tampilan form diatas, *user* dapat mengisi pilihan terkait Level Laporan, Kode BA, Jenis Uji Laporan, Kelompok Telaah, Layer dan Periode Pelaporan untuk kemudian menghasilkan *output* sesuai dengan filter yang dipilih.

a. Prosedur Analitis LRA vs LO

Tampilan isian filter untuk Prosedur Analitis LRA vs LO adalah sebagai berikut:

Filter

Silakan mengisi filter

Level Laporan WAJIB

KEMENTERIAN

BA

015 KEMENTERIAN K...

Uji Laporan WAJIB

LRA VS LO

Telaah

-- Pilih Kelompok Tela...

Layer

Layer 1

UJI PNBP (42)
UJI BELANJA PEGAWAI (51)
UJI BELANJA BARANG DAN JASA
UJI BELANJA PERJALANAN DINAS

X
HAPUS ISIAN

1) Uji Nilai PNPB

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan antara Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LO dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LRA.

Prosedur Analitis LRA vs LO Layer 1 Tingkat KL

Filter PDF XLSX							
FILTER AKTIF: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 TELAHAH: UJI PNPB (42) UJI LAPORAN: LRA VS LO							
NO	JENIS TELAHAH	KODE	DESKRIPSI	LO	LRA	TRANSAKSI AKRUAL	AKSI
1	LRA VS LO PENDAPATAN	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	-17.985.398.227.661	-18.426.876.381.921	441.478.154.260	

Nilai yang muncul pada kolom Transaksi Akrua merupakan kumpulan jurnal transaksi akrua yang detailnya dikelompokkan dalam Kode Telaah pada Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Transaksi Akrua.

Layer 2

Menampilkan detail selisih perbandingan antara Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LO dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LRA yakni jurnal transaksi akrua yang dikelompokkan berdasarkan Kode Telaah.

Prosedur Analitis LRA vs LO Layer 2 Tingkat KL

Filter PDF XLSX											
FILTER AKTIF: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 2 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 TELAHAH: UJI PNPB (42) UJI LAPORAN: LRA VS LO											
NO	JENIS TELAHAH	TRANSAKSI	KODE TELAHAH	NAMA TELAHAH	KODE BA	NAMA BA	PERIODE	LO	LRA	SELISIH	AKSI
1	LRA VS LO PENDAPATAN	Transaksi Akun 42	1b03	Pendapatan/ Pengembalian Belanja TAYL melalui Potongan SPM atau Pengembalian Kelebihan Pendapatan (SPM PP, SPM KP, dll) yang belum terbit SP2D	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-10.803.099.637	-10.496.403.932	-306.695.705	
2	LRA VS LO PENDAPATAN	Transaksi Akun 49	1a05	Jurnal Manual(Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 49XXXX))	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-4.969.841.970	0	-4.969.841.970	
3	LRA VS LO PENDAPATAN	Transaksi Akun 42	1b01	Pencatatan Piutang yang berbeda periode dengan pelunasan piutang	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	707193.948	0	707193.948	

Nilai yang muncul pada kolom Selisih tersebut merupakan kumpulan jurnal transaksi akrua yang detailnya dapat dilihat pada Layer 3. Untuk melihat Layer 3, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 3

Menampilkan daftar jurnal transaksi akrua dengan format CSV yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan *Ms Excel*.

2) Uji Nilai Belanja/Beban Pegawai

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Beban Pegawai pada LO dengan Belanja Pegawai pada LRA.

Prosedur Analitis LRA vs LO Layer 1 Tingkat KL

Filter PDF XLSX							
FILTER AKTIF: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 TELAHAH: UJI BELANJA PEGAWAI (51) UJI LAPORAN: LRA VS LO							
NO	JENIS TELAHAH	KODE	DESKRIPSI	LO	LRA	TRANSAKSI AKRUAL	AKSI
1	LRA VS LO BELANJA PEGAWAI	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.049.517.336.300	14.732.533.461.505	316.983.874.795	

Nilai yang muncul pada kolom Transaksi AkruaI merupakan kumpulan jurnal transaksi akruaI yang detailnya dikelompokkan dalam Kode Telaah pada Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Transaksi AkruaI.

Layer 2

Menampilkan detail selisih perbandingan Beban Pegawai pada LO dengan Belanja Pegawai pada LRA yakni jurnal transaksi akruaI yang dikelompokkan berdasarkan Kode Telaah.

Prosedur Analitis LRA vs LO Layer 2 Tingkat KL ①

Filter

PDF

XLSX

Filter Aktif:

BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

LAYER: LAYER 2

LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN

PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06

Telaah: Uji Belanja Pegawai (51)

Uji Laporan: LRA VS LO

Q

cari di halaman...

NO	JENIS TELAHAH	TRANSAKSI	KODE TELAHAH	NAMA TELAHAH	KODE BA	NAMA BA	PERIODE	LO	LRA	SELISIH	AKSI
1	LRA VS LO BELANJA PEGAWAI	Transaksi Belanja Pegawai	2a01	BAST Ekstrakompitel/Jasa dan/atau Spoby/SPP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST Ekstrakompitel/Jasa namun memilih Aset Intrakompitel	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	15.059.218.907.183	14.737.512.248.276	321.706.658.907	
2	LRA VS LO BELANJA PEGAWAI	Transaksi Belanja Pegawai	2a03	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 51XXXXXX)	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-4.684.155.170	0	-4.684.155.170	
3	LRA VS LO BELANJA PEGAWAI	Transaksi Belanja Pegawai	2a02	Pengembalian Belanja yang Berasal dari Potongan SPM yang belum terbit SP2D	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-5.017.415.713	-4.978.786.771	-38.628.942	

Nilai yang muncul pada kolom Selisih tersebut merupakan kumpulan jurnal transaksi akruaI yang detailnya dapat dilihat pada Layer 3. Untuk melihat Layer 3, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 3

Menampilkan daftar jurnal transaksi akruaI dengan format CSV yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan *Ms Excel*.

3) Uji Nilai Belanja/Beban Barang dan Jasa Selain Perjalanan Dinas

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA.

Prosedur Analitis LRA vs LO Layer 1 Tingkat KL ①

Filter PDF XLSX						
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 Telaah: Uji Belanja Barang dan Jasa Uji Laporan: LRA vs LO Q cari di halaman...						
NO	JENIS TELAHAH	KODE	DESKRIPSI	LO	LRA	TRANSAKSI AKRUAL
1	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.749.719.265.777	20.002.461.831.769	-2.252.742.565.992

Nilai yang muncul pada kolom Transaksi AkruaI merupakan kumpulan jurnal transaksi akruaI yang detailnya dikelompokkan dalam Kode Telaah pada Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Transaksi AkruaI.

Layer 2

Menampilkan detail selisih perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA yakni jurnal transaksi akruaI yang dikelompokkan berdasarkan Kode Telaah.

Filter

PDF

XLSX

Filter Aktif:

BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

LAYER: LAYER 2

LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN

PERIODE SAMPAI DENGAN: 2025-06

Telaah: Uji Belanja Barang dan Jasa

Uji Laporan: LRA vs LO

cari di halaman...

NO	JENIS TELAAH	TRANSAKSI	KODE TELAAH	NAMA TELAAH	KODE BA	NAMA BA	PERIODE	LO	LRA	SELISIH	AKSI
1	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA	Transaksi Akun 521XXX, 522XXX, 525XXX	3a02	Pengembalian Belanja yang Berasal dari Potongan SPM yang belum terbit SP2D	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-320.304.929	-320.304.929	0	
2	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA	Transaksi Akun 521XXX, 522XXX, 525XXX	3a01	BAST Ekstrakomptabel/Jasa dan/atau Spby/SP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST Ekstrakomptabel/Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	20.191.267.815.072	20.002.782.136.698	188.485.678.374	
3	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA	Transaksi Akun 521XXX, 522XXX, 525XXX	3a03	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 52XXXX)	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-2.441.228.244.366	0	-2.441.228.244.366	

Nilai yang muncul pada kolom Selisih tersebut merupakan kumpulan jurnal transaksi akrual yang detailnya dapat dilihat pada Layer 3. Untuk melihat Layer 3, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 3

Menampilkan daftar jurnal transaksi akrual dengan format CSV yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan *Ms Excel*.

4) Uji Nilai Belanja/Beban Perjalanan Dinas

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA.

Filter PDF XLSX							
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2025-06 Telaah: Uji Belanja Perjalanan Dinas Uji Laporan: LRA vs LO cari di halaman...							
NO	JENIS TELAAH	KODE	DESKRIPSI	LO	LRA	TRANSAKSI AKRUAL	AKSI
1	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	376.924.342.696	369.858.085.380	7.066.257.316	

Nilai yang muncul pada kolom Transaksi Akrual merupakan kumpulan jurnal transaksi akrual yang detailnya dikelompokkan dalam Kode Telaah pada Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Transaksi Akrual.

Layer 2

Menampilkan detail selisih perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA yakni jurnal transaksi akrual yang dikelompokkan berdasarkan Kode Telaah.

Filter

PDF

XLSX

Filter Aktif:

BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

LAYER: LAYER 2

LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN

PERIODE SAMPAI DENGAN: 2025-06

Telaah: Uji Belanja Perjalanan Dinas

Uji Laporan: LRA VS LO

cari di halaman...

NO	JENIS TELAAH	TRANSAKSI	KODE TELAAH	NAMA TELAAH	KODE BA	NAMA BA	PERIODE	LO	LRA	SELISIH	AKSI
1	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS	Transaksi Belanja Perjalanan Dinas	4a01	BAST Ekstrakomptabel/Jasa dan/atau Spby/SP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST Ekstrakomptabel/Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	377.442.079.075	370.343.257.759	7.098.821.316	
2	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS	Transaksi Belanja Perjalanan Dinas	4a03	Jurnal GLP dan/atau Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 524XXX)	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-32.564.000	0	-32.564.000	
3	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS	Transaksi Belanja Perjalanan Dinas	4a02	Pengembalian Belanja yang Berasal dari Potongan SPM yang belum terbit SP2D	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	06	-485.172.379	-485.172.379	0	

Nilai yang muncul pada kolom Selisih tersebut merupakan kumpulan jurnal transaksi akrual yang detailnya dapat dilihat pada Layer 3. Untuk melihat Layer 3, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 3

Menampilkan daftar jurnal transaksi akrual dengan format CSV yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan *Ms Excel*.

b. Prosedur Analitis LO vs Neraca

Tampilan isian filter untuk Prosedur Analitis LO vs Neraca adalah sebagai berikut:

Filter

Silakan mengisi filter

Level Laporan

WAJIB

KEMENTERIAN

✕

▼

Uji Laporan

WAJIB

LO VS Neraca

✕

▼

Layer

Layer 1

✕

▼

✕

HAPUS ISIAN

BA

015 KEMENTERIAN K...

✕

▼

Telaah

-- Pilih Kelompok Tela...

▼

Uji Penyusutan/Amortisasi (Seluruh Aset)

Uji Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uji Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uji Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uji Penyusutan Aset Tetap Lainnya

1) Uji Beban Penyusutan/Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Neraca dengan Beban Penyusutan/Amortisasi pada LO.

Prosedur Analitis LO vs Neraca Layer 1 Tingkat KL ⓘ

						Filter	PDF	XLXS
FILTER AKTIF: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2028-06 TELAARH: UJI PENYUSUTAN/AMORTISASI (SELURUH ASET) UJI LAPORAN: LO VS NERACA						cari di halaman...		
NO	JENIS TELAARH	KODE BA	DESKRIPSI	AKUMULASI PENYUSUTAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	DEBAN PENYUSUTAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	SELISIH		
1	LO VS Neraca Beban Penyusutan/Amortisasi vs Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Seluruh Jenis Aset Tetap dan Aset Lainnya)	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	-177.847.510.710	64.764.500	-177.912.275.210		

Nilai yang muncul pada kolom Selisih merupakan kumpulan jurnal transaksi penyesuaian yang detailnya dapat dilihat di Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 2

Menampilkan detail selisih perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Neraca dengan Beban Penyusutan/Amortisasi pada LO yakni jurnal transaksi penyesuaian.

Prosedur Analitis LO vs Neraca Layer 2 Tingkat KL

Filter PDF XLSX									
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 2 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 TELAH: UJI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH UJI LAPORAN: LO VS NERACA cari di halaman...									
NO	JENIS TELAAH	JENIS TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	KODE BA	NAMA BA	KODE AKUN	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN BERJALAN	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	SELISIH
1	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	4	HAPUS BUKU	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	115211	-14.639.598	0	-14.639.598
2	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		JURNAL MANJUAL	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	594211	-58.265.192	-58.265.192	0
3	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		JURNAL MANJUAL	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	594212	-4.220.562	-4.220.562	0
4	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		JURNAL MANJUAL	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	594931	-25.000	-25.000	0

2) Uji Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih vs Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Neraca dengan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Prosedur Analitis LO vs Neraca Layer 1 Tingkat KL

Filter PDF XLSX						
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 TELAH: UJI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH UJI LAPORAN: LO VS NERACA cari di halaman...						
NO	JENIS TELAAH	KODE BA	DESKRIPSI	AKUMULASI PENYUSUTAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	BEBAN PENYUSUTAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	SELISIH
1	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	-77.150.352	-62.510.754	-14.639.598

Nilai yang muncul pada kolom Selisih merupakan kumpulan jurnal transaksi penyesuaian yang detailnya dapat dilihat di Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 2

Menampilkan detail selisih perbandingan Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Neraca dengan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada LO yakni jurnal transaksi penyesuaian.

Prosedur Analitis LO vs Neraca Layer 2 Tingkat KL

Filter PDF XLSX									
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 2 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2026-06 TELAH: UJI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH UJI LAPORAN: LO VS NERACA cari di halaman...									
NO	JENIS TELAAH	JENIS TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	KODE BA	NAMA BA	KODE AKUN	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN BERJALAN	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	SELISIH
1	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	4	HAPUS BUKU	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	115211	-14.639.598	0	-14.639.598
2	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		JURNAL MANJUAL	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	594211	-58.265.192	-58.265.192	0
3	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		JURNAL MANJUAL	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	594212	-4.220.562	-4.220.562	0
4	LO VS Neraca Beban Penyisihan Piutang vs Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		JURNAL MANJUAL	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	594931	-25.000	-25.000	0

c. Prosedur Analitis LO vs LPE

Tampilan isian filter untuk Prosedur Analitis LO vs LPE adalah sebagai berikut:

Filter

Silakan mengisi filter

Level Laporan WAJIB

KEMENTERIAN
X
v

Uji Laporan WAJIB

LO VS LPE
X
v

Periode Sampai Dengan WAJIB

2025-14
X
v

BA

015 KEMENTERIAN K...
X
v

Layer

Layer 1
X
v

X
HAPUS ISIAN

v
KIRIM

Uji Surplus/Defisit LO dan LPE

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Surplus/Defisit pada LO dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Prosedur Analitis LO vs LPE Layer 1 Tingkat KL ⓘ

Filter PDF XLSX						
FILTER AKTIF: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2025-14 UJI LAPORAN: LO VS LPE						
NO	JENIS TELAHAH	KODE BA	DESKRIPSI	SURPLUS DEFISIT LO	SURPLUS DEFISIT LPE	SELISIH
1	LO VS LPE LPE Vs LO Surplus/ Defisit	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.096.086.518.598.802	2.096.086.518.598.802	0

Nilai yang muncul pada kolom Selisih merupakan kumpulan jurnal transaksi dengan Akun Non Referensi yang detailnya berupa daftar akun dengan deskripsi NULL dapat dilihat di Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 2

Menampilkan daftar transaksi selisih angka Surplus/Defisit LO dan LPE yakni daftar akun dengan deskripsi NULL. Apabila tidak terdapat selisih maka tidak akan muncul data selisih.

d. Prosedur Analitis LPE vs Neraca

Tampilan isian filter untuk Prosedur Analitis LPE vs Neraca adalah sebagai berikut:

Filter
Silakan mengisi filter

Level Laporan WAJIB

KEMENTERIAN

BA

015 KEMENTERIAN K...

Uji Laporan WAJIB

LPE VS Neraca

Layer

Layer 1

Periode Sampai Dengan WAJIB

2025-14

HAPUS ISIAN

KIRIM

Uji Ekuitas Akhir LPE dan Ekuitas Akhir Neraca

Layer 1

Menampilkan *summary* perbandingan Ekuitas Akhir pada LPE dengan Ekuitas Akhir pada Neraca.

Prosedur Analitis LPE vs Neraca Layer 1 Tingkat KL ①

Filter PDF XLSX						
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 1 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2025-14 UJI LAPORAN: LPE VS NERACA						
NO	JENIS TELAHAH	KODE BA	DESKRIPSI	EKUITAS AKHIR LPE	EKUITAS AKHIR NERACA	SELISIH
1	LPE VS NERACA LPE Vs Neraca Ekuitas Akhir	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	-135.809.823.826.597	-135.809.823.826.597	0

Nilai yang muncul pada kolom Selisih merupakan daftar pos pembentuk Ekuitas Akhir yang detailnya dapat dilihat di Layer 2. Untuk melihat Layer 2, *user* melakukan *klik* pada nilai kolom Selisih.

Layer 2

Menampilkan detail perbandingan pos pembentuk Ekuitas Akhir pada LPE dengan Ekuitas Akhir pada Neraca.

Prosedur Analitis LPE vs Neraca Layer 2 Tingkat KL ①

Filter PDF XLSX								
Filter Aktif: BA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN LAYER: LAYER 2 LEVEL LAPORAN: KEMENTERIAN PERIODE SAMPAI DENGAN: 2025-14 UJI LAPORAN: LPE VS NERACA								
NO	JENIS TELAHAH	PERIODE	KODE BA	KODE URUT	URAIAN	EKUITAS AKHIR LPE	EKUITAS AKHIR NERACA	SELISIH
8	LPE Vs Neraca Ekuitas Akhir	14	015	09	KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0
9	LPE Vs Neraca Ekuitas Akhir	14	015	10	LAIN-LAIN	0	0	0
10	LPE Vs Neraca Ekuitas Akhir	14	015	11	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0
11	LPE Vs Neraca Ekuitas Akhir	14	015	12	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4.098.773.626.785	4.098.773.626.785	0
12	LPE Vs Neraca Ekuitas Akhir	14	015	13	EKUITAS AKHIR	4.098.773.626.785	4.098.773.626.785	0

LAMPIRAN I – TRANSAKSI AKRUAL

Tabel berikut menyajikan jenis Transaksi Akrua yang berpotensi menimbulkan selisih antara pengakuan pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas dengan pengakuan pendapatan dan beban pada Laporan Operasional (LO) yang berbasis akrual.

Transaksi Akrua	Penyebab Selisih	Dampak pada LO	Dampak pada LRA
Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	Revaluasi saldo aset/kewajiban valas ke Rupiah pada tanggal pelaporan menggunakan kurs tengah BI, tanpa transaksi kas riil	Diakui sebagai pendapatan non-operasional	Tidak diakui (tidak ada arus kas)
Pendapatan Sitaan/Rampasan	Pengakuan berdasarkan putusan pengadilan inkracht, sedangkan realisasi kas baru terjadi saat lelang/penjualan	Diakui saat putusan berkekuatan hukum tetap	Diakui belakangan, saat kas hasil lelang diterima
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Perolehan aset yang tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian, Transfer Masuk, Hibah Masuk, Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS	Diakui sebagai pendapatan non-operasional	Tidak diakui (tidak ada transaksi kas)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Selisih dari koreksi atas persediaan yang diperoleh pada Tahun Anggaran Berjalan berupa koreksi yang menambah saldo persediaan kecuali opname fisik	Diakui sebagai pendapatan non-operasional	Tidak diakui (murni penyesuaian akrual)
Pencatatan Piutang Berbeda Periode dengan Pelunasan	Piutang diakui saat timbul hak tagih; kas diakui saat pelunasan, dapat berbeda periode	Diakui pada periode timbulnya piutang	Diakui pada periode pelunasan (kas diterima)
Penerimaan PNPB dengan SBS Belum Disetor ke RKUN	PNBP telah dipungut/diterima satker namun belum disetor ke RKUN	Diakui saat hak atas PNPB timbul	Belum diakui sampai kas disetor ke Kas Negara
Pendapatan Melalui Potongan SPM/Pengembalian Kelebihan Pendapatan Belum SP2D	Substansi pendapatan sudah terjadi, namun SP2D belum terbit	Diakui saat substansi transaksi terjadi	Diakui setelah SP2D terbit
Hibah Masuk BLU (Barang/Jasa/Surat Berharga)	Hibah diterima dalam bentuk non-kas	Diakui penuh sebagai pendapatan non-operasional	Tidak diakui (tidak ada kas masuk)
Penerimaan Kas BLU Belum Terbit SP2B BLU	Kas telah diterima BLU, namun pengesahan SP2B oleh KPPN belum terbit	Diakui saat kas diterima (substansi ekonomi)	Diakui setelah SP2B BLU terbit
SPP Belanja yang Belum Terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL	Barang/jasa telah diterima (BAST) dan SPP telah diajukan, namun SP2D/SP2B BLU/SPHL belum terbit hingga akhir periode	Diakui sebagai Beban dan Utang kepada Pihak Ketiga	Belum diakui sampai SP2D/SP2B BLU/SPHL terbit
Pengembalian Belanja dari Potongan SPM yang Belum	Kelebihan pembayaran belanja telah diketahui, namun SP2D pengembalian belum diproses KPPN	Telah diakui sebagai pengurang beban	Belum menjadi pengurang realisasi belanja sampai

Transaksi Akrua	Penyebab Selisih	Dampak pada LO	Dampak pada LRA
Terbit SP2D			SP2D pengembalian terbit
Pengisian RPATA/Escrow Lainnya Berbeda Tahun dengan Realisasi/ Penihilan	Ketika telah dilakukan pengisian RPATA, maka pada LRA sudah tercatat realisasi belanja namun pada LO belum diakui sebagai beban. Pengakuan pada LO ketika sudah ada realisasi pekerjaan riil	Diakui saat sudah ada prestasi pekerjaan riil;	Realisasi belanja tercatat saat pengisian (tahun T)
BAST Ekstrakomptabel/ Jasa/SPBy/SPP Non-BAST Belum SP2D, atau BAST Ekstrakomptabel Salah Pilih Aset	Ketika belum terbit SP2D maka belum diakui pada LRA. Selain itu apabila terdapat kesalahan memilih Aset untuk pencatatan BAST Ekstrakomptabel, maka tidak tercatat sebagai beban pada LO	Telah diakui sebagai Beban; Salah pilih aset untuk ekstrakomptabel tidak membentuk beban LO	Belum diakui sampai SP2D terbit; Realisasi BAST Ekstrakomptabel diakui sebagai belanja
BAST Ekstrakomptabel/ Jasa Menggunakan Akun BMN, atau SPBy/SPP Akun BMN Non-BAST	Ketika BAST Ekstrakomptabel namun mencatat Aset, atau ketika SPBy/SPP dengan akun yang membentuk BMN namun tidak ada BAST Intrakomp maka terbentuk akun 595XXX	Memerlukan jurnal koreksi	Tidak terpengaruh (nilai realisasi belanja sama, hanya salah akun/ klasifikasi)

LAMPIRAN II – AKUN NON REFERENSI

Penjelasan mengenai akun-akun Non Referensi beserta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Indikasi Penyebab	Tindak Lanjut
1	Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar kas dan buku besar akrual.	Terdapat setoran pendapatan (akun 425xxx) menggunakan akun yang tidak seharusnya (misalnya akun BUN)	Satker mengajukan ralat dokumen setoran/penerimaan dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN.
2	Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debit pada buku besar akrual.	Terdapat kesalahan pemilihan akun ketika melakukan jurnal melalui Modul GLP	Satker melakukan eliminasi jurnal melalui Modul GLP untuk mengeliminasi akun NULL dan memunculkan akun yang seharusnya.
3	Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual	Terdapat transaksi pengembalian belanja modal yang belum diikuti jurnal melalui Modul GLP	- Satker merekam transaksi koreksi nilai pada Modul Aset Tetap akibat adanya pengembalian belanja modal, sehingga terbentuk jurnal: (D) Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi (K) Aset Tetap/Aset Lainnya (D) Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (K) Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi - Satker melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Akun 53xxxx (sesuai akun belanjanya) (K) Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi
4	Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual	Terdapat transaksi pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan TAB yang belum diikuti jurnal melalui Modul GLP.	- Satker merekam transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan akibat adanya pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan, sehingga terbentuk jurnal: (D) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (K) Persediaan - Satker agar melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya) (K) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

No	Permasalahan	Indikasi Penyebab	Tindak Lanjut
5	Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual	a. Terdapat pencatatan belanja barang yang menghasilkan persediaan pada Modul Komitmen namun satker memilih BAST barang ekstrakomptabel b. Terdapat realisasi belanja barang yang menghasilkan persediaan, namun satker tidak merekam BAST pada Modul Komitmen. Satker langsung merekam SPP dengan akun belanja yang menghasilkan persediaan tanpa BAST.	1. Pendetailan pada Modul Aset Tetap harus mengikuti pilihan BAST-nya (barang ekstrakomptabel). 2. Jika barang yang dihasilkan seharusnya persediaan, lakukan reklasifikasi dari ekstrakomptabel ke persediaan, sehingga otomatis terbentuk jurnal transaksi reklasifikasi masuk persediaan: (D) Persediaan (K) Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 3. Atas kondisi nomor 2, lakukan jurnal pada Modul GLP: (D) Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (K) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya) 4. Jika barang yang dihasilkan sudah benar (merupakan barang ekstrakomptabel) dan telah dilakukan pencatatan, lakukan jurnal pada Modul GLP: (D) Beban Ekstrakomptabel (akun 52125x atau 52516x) (K) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya) 5. Jika riil barang yang dihasilkan adalah barang ekstrakomptabel sebagaimana poin 4, satker melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dari akun belanja barang yang menghasilkan persediaan menjadi akun belanja ekstrakomptabel, sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 6. Dalam hal realisasi belanja barang yang menghasilkan persediaan tersebut secara riil menghasilkan persediaan, satker merekam persediaan melalui menu perolehan lainnya, sehingga terbentuk jurnal: (D) Persediaan (K) Pendapatan Perolehan Lainnya

No	Permasalahan	Indikasi Penyebab	Tindak Lanjut
			7. Satker agar melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Pendapatan Perolehan Lainnya (K) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya)
6	Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debit pada buku besar akrual	Terdapat realisasi belanja modal (53xxxx) namun satker tidak merekam BAST pada Modul Komitmen. Satker langsung merekam SPP dengan akun 53xxxx tanpa BAST.	1. Dalam hal realisasi belanja modal tersebut secara riil menghasilkan aset tetap/aset lainnya, satker merekam aset tetap/aset lainnya pada Modul Aset Tetap melalui menu perolehan lainnya, sehingga terbentuk jurnal: (D) Aset Tetap/Aset Lainnya (K) Pendapatan Perolehan Lainnya 2. Satker agar melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Pendapatan Perolehan Lainnya (K) Akun 53xxxx (sesuai akun belanjanya)

Atas akun-akun Non Referensi beserta tindak lanjutnya dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut:

1. Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar kas dan buku besar akrual

Ilustrasi 1a: penerimaan melalui penyeteroran oleh wajib bayar ke kas negara

Pada Satker Z, terdapat pengembalian belanja barang TAYL (425912) senilai Rp3.500.000 yang disetorkan ke kas negara oleh penyedia barang dan jasa menggunakan akun penerimaan kembali belanja hibah TAYL (425916). Akun 425916 merupakan akun yang seharusnya digunakan oleh satker lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) yang memiliki tugas dan fungsi merealisasikan belanja hibah (56xxxx), dalam hal ini Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta Ditjen Perimbangan Keuangan. Transaksi tersebut berdampak pada munculnya akun 425916 dengan uraian NULL dalam Neraca Percobaan serta selisih nilai surplus defisit antara LO dengan LPE pada Satker Z. Pencatatan yang timbul dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Atas penyeteroran yang dilakukan oleh wajib bayar ke kas negara, Satker Z melakukan pencatatan data penerimaan (Non Surat Bukti Setor/Non SBS) pada Modul Bendahara atau melakukan upload data penerimaan dari SIMPONI, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	LPE
K	425916	NULL	3.500.000	-

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	-
K	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	3.500.000	LRA

- b. Atas kondisi ini, satker menindaklanjuti dengan melakukan ralat dokumen setoran (Bukti Penerimaan Negara/BPN) dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014. Penghapusan BPN lama dan pencatatan ralat BPN pada SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	NULL	3.500.000	-
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	LPE
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	LPE
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.500.000	LO

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	3.500.000	LRA
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	-
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	-
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.500.000	LRA

Ilustrasi 1b: penerimaan melalui penyetoran oleh wajib bayar ke bendahara, selanjutnya bendahara yang melakukan penyetoran ke kas negara

Pada Satker Z, terdapat pengembalian belanja honor TAYL senilai Rp1.000.000, di mana pegawai yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui bendahara. Pengembalian belanja barang TAYL yang seharusnya menggunakan akun 425912 dilakukan penyetoran oleh bendahara ke kas negara menggunakan akun penerimaan kembali belanja hibah TAYL (425916). Transaksi dengan akun yang tidak seharusnya digunakan oleh K/L tersebut berdampak pada munculnya akun 425916 dengan uraian NULL dalam Neraca Percobaan serta selisih nilai surplus defisit antara LO dengan LPE pada Satker Z. Pencatatan yang timbul dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kas masuk yang berasal dari penyetoran oleh wajib bayar kepada bendahara dicatat pada Modul Bendahara sebagai penerimaan SBS, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111711/ 111821	Kas di Bendahara Penerimaan/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.000.000	Neraca
K	425916	NULL	1.000.000	-

- b. Selanjutnya, bendahara melakukan penyetoran ke kas negara dan mencatatnya pada Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	111711/ 111821	Kas di Bendahara Penerimaan/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.000.000	Neraca

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA

- c. Atas kondisi ini, satker menindaklanjuti dengan melakukan ralat dokumen setoran dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014. Penghapusan dokumen setoran lama dan pencatatan ralat bukti setoran pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	NULL	1.000.000	-
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LO

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LRA

Ilustrasi 1c: penerimaan negara melalui potongan SPM

Pada Satker Z, terdapat pengembalian belanja honor TAYL senilai Rp1.000.000 yang dilakukan melalui potongan SPM. Satker salah mencantumkan akun pengembalian belanja hibah TAYL (425916) pada kolom potongan SPM. Pencatatan yang timbul dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat resume tagihan (penerbitan SPP/SPM) dengan potongan akun 425916 pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	1.000.000	Neraca
K	425916	NULL	1.000.000	-

- b. Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D melalui Modul Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	115212	Piutang Lainnya	1.000.000	Neraca

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA

- c. Atas kondisi ini, satker melakukan ralat data penerimaan negara tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	NULL	1.000.000	-
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LO

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LRA

2. Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual

Ilustrasi 2: kesalahan pemilihan akun ketika melakukan penjurnalan pada Modul GLP

Pada Satker W, terdapat pendapatan layanan senilai Rp5.000.000 yang belum diterima pembayarannya sehingga Satker W mencatat timbulnya piutang PNBPN pada bulan September 2025. Satker W belum menggunakan Modul Piutang sehingga seluruh transaksi terkait piutang direkam melalui penjurnalan pada Modul GLP.

Pada bulan Oktober 2025, diketahui bahwa terjadi kesalahan pencatatan di mana nilai piutang PNBPN dan pendapatan seharusnya sebesar Rp4.500.000. Satker W melakukan penyesuaian pencatatan piutang PNBPN dan pendapatan melalui penjurnalan pada Modul GLP, namun terjadi kesalahan pemilihan akun 425746 (Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan). Akun tersebut tidak seharusnya digunakan oleh K/L sehingga berdampak pada munculnya akun NULL dalam laporan keuangan. Pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan pendapatan terutang (piutang PNBPN)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115xxx	Piutang PNBPN	5.000.000	Neraca
K	425xxx	Pendapatan Layanan xxx	5.000.000	LO

b. Penyesuaian nilai piutang TAB

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425746	NULL	500.000	-
K	115xxx	Piutang PNBPN	500.000	Neraca

- c. Atas kondisi tersebut, Satker W melakukan tindak lanjut berupa penjurnalan melalui Modul GLP untuk mengeliminasi akun NULL dan memunculkan akun yang seharusnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425xxx	Pendapatan Layanan xxx	500.000	LO
K	425746	NULL	500.000	-

3. Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual

Ilustrasi 3: pengembalian belanja modal

Pada Satker A, terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin (akun 532111) sebesar Rp30.000.000. Pada semester yang sama, terjadi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin yang berdampak pada koreksi kurang nilai aset sebesar Rp4.000.000. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	Aset Belum Diregister	30.000.000	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	30.000.000	Neraca

- b. Pendetailan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132111	Peralatan dan Mesin	30.000.000	Neraca
K	532111	Aset Belum Diregister	30.000.000	Neraca

- c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	30.000.000	Neraca
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	30.000.000	Neraca

- d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	30.000.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	30.000.000	LPE

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	30.000.000	-

- e. Pencatatan pengembalian belanja pada Modul Bendahara

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.000.000	LPE
K	532111	NULL	4.000.000	-

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.000.000	-
K	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	LRA

- f. Pencatatan transaksi koreksi nilai pada Modul Aset Tetap

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.000.000	LPE
K	132111	Peralatan dan Mesin	4.000.000	Neraca

- g. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjumlahan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	NULL	4.000.000	-
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.000.000	LPE

4. Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual

Ilustrasi 4: pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan TAB

Pada Satker B, terdapat realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp10.000.000. Pada periode yang sama, terjadi pengembalian belanja dengan akun 521811 yang berdampak pada koreksi kurang nilai persediaan sebesar Rp500.000. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan Belum Diregister	10.000.000	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	10.000.000	Neraca

b. Pendetailan persediaan pada Modul Persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	10.000.000	Neraca
K	117911	Persediaan Belum Diregister	10.000.000	Neraca

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	10.000.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.000.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran
Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.000.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000.000	LPE

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000.000	-

e. Pencatatan pengembalian belanja pada Modul Bendahara
Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500.000	LPE
K	521811	NULL	500.000	-

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500.000	-
K	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	LRA

f. Pencatatan transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan (dalam hal persediaan tersebut belum terjadi pemakaian)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	500.000	LO
K	117111	Barang Konsumsi	500.000	Neraca

- g. Pencatatan transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan (dalam hal persediaan tersebut telah terjadi pemakaian)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	500.000	LO
K	117111	Barang Konsumsi	500.000	Neraca
D	117111	Barang Konsumsi	500.000	Neraca
K	593111	Beban Persediaan Konsumsi	500.000	LO

- h. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	500.000	-
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	500.000	LO

5. Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi debit pada buku besar akrual

Ilustrasi 5a: pembelian persediaan menggunakan akun belanja yang menghasilkan persediaan, namun salah memilih BAST barang ekstrakomptabel

Pada Satker C, terdapat pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) melalui realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp850.000. Pada saat merekam BAST melalui Modul Komitmen, terjadi kesalahan pemilihan BAST jasa/non aset/belanja modal pengembangan di bawah kapitalisasi aset, di mana Satker B mendetailkan barang berupa peralatan dan mesin ekstrakomptabel. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	850.000	-
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	850.000	Neraca

- b. Pendetailan peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada Modul Aset Tetap

Tidak membentuk jurnal

- c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	850.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	850.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

Buku Besar Akrua

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	850.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	850.000	LPE

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	850.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	850.000	-

e. Pencatatan perolehan persediaan melalui reklasifikasi dari peralatan dan mesin ekstrakomptabel menjadi barang konsumsi

1) Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada Modul Aset Tetap

Tidak membentuk jurnal

2) Reklasifikasi masuk barang konsumsi pada Modul Persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	850.000	Neraca
K	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	850.000	LPE

f. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	850.000	LPE
K	521811	NULL	850.000	-

Ilustrasi 5b: pembelian barang ekstrakomptabel menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan, memilih BAST barang ekstrakomptabel

Pada Satker B, terdapat pembelian peralatan dan mesin ekstrakomptabel melalui realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp900.000. Pada saat merekam BAST melalui Modul Komitmen, dipilih BAST jasa/non aset/belanja modal pengembangan di bawah kapitalisasi aset, di mana Satker B mendetailkan barang berupa peralatan dan mesin ekstrakomptabel melalui Modul Aset Tetap. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	900.000	-
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	900.000	Neraca

b. Pendetailan peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada Modul Aset Tetap

Tidak membentuk jurnal

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	900.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	900.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	900.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	LPE

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	900.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	-

e. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521252	Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	900.000	LO
K	521811	NULL	900.000	-

f. Selain itu, mengingat adanya ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang (pembelian barang ekstrakomptabel menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan), satker agar melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dari akun 521811 menjadi akun 521252, dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan dokumen ralat SP2D tersebut memunculkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	-
K	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	900.000	LRA
D	521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	900.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	-

- g. Apabila berdasarkan pertimbangan manajemen satker tidak melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran, ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang tersebut akan tetap termonitor dalam MyIntress.

Ilustrasi 5c: pembelian persediaan dengan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan, namun tidak melakukan perekaman BAST

Pada Satker C, terdapat pembelian alat tulis melalui realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp625.000, namun satker tidak merekam BAST melalui Modul Komitmen. Ketika akan dilakukan pembayaran, Satker C membuat SPP dengan akun 521811 tanpa BAST. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan pada Modul Persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	625.000	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	625.000	LO

- b. Perekaman SPP/SPM dengan akun 521811 tanpa BAST pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	625.000	-
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	625.000	Neraca

- c. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	625.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	625.000	LPE

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	625.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	625.000	-

- d. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	625.000	LO
K	521811	NULL	625.000	-

6. Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual

Ilustrasi 6: pembelian aset tetap/aset lainnya dengan akun belanja modal, namun tidak melakukan perekaman BAST

Pada Satker D, terdapat pembelian peralatan dan mesin melalui realisasi belanja modal (akun 532111) sebesar Rp3.000.000, namun satker tidak merekam BAST melalui Modul Komitmen. Ketika akan dilakukan pembayaran, Satker D membuat SPP dengan akun 532111 tanpa BAST. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132111	Peralatan dan Mesin	3.000.000	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.000.000	LO

- b. Perekaman SPP/SPM dengan akun 532111 tanpa BAST pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	NULL	3.000.000	-
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	3.000.000	Neraca

- c. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

Buku Besar Akrual

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	3.000.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.000.000	LPE

Buku Besar Kas

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.000.000	-

- d. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.000.000	LO
K	532111	NULL	3.000.000	-

- e. Atas ketidaksesuaian akun ini (pembelian peralatan dan mesin menggunakan akun belanja bahan), satker agar melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dari akun 521211 menjadi akun 532111, dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan dokumen ralat SP2D tersebut memunculkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.500.000	-
K	521211	Belanja Bahan	7.500.000	LRA
D	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.500.000	-

- f. Selain itu, satker melakukan penjurnalan melalui Modul GLP untuk mengeliminasi beban yang tidak seharusnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.500.000	LO
K	521211	Beban Bahan	7.500.000	LO

- g. Apabila berdasarkan pertimbangan manajemen satker tidak melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran, ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang tersebut akan tetap termonitor dalam MyIntress.

Catatan:

Setiap jurnal yang dilakukan melalui Modul GLP agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan dilampiri dokumen pendukung terkait.